

# **KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS: DESA LINGGASARI KECAMATAN KEMBARANKABUPATEN BANYUMAS)**

**Wavip Zahri Jatmiko<sup>1\*</sup>, Meutia Karunia Dewi<sup>2</sup>, Rio Dhani Laksana<sup>3</sup>, Ari Setyo Prihdiyanti<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Jenderal Soedirman, wavip.jatmiko@mhs.unsoed.ac.id, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Jenderal Soedirman, meutia.dewi@unsoed.ac.id, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Jenderal Soedirman, riodhani@unsoed.ac.id, Indonesia

<sup>4</sup>DJPb Kanwil Jawa Tengah, Indonesia

\*corresponding author

---

## **ABSTRAK**

Kebijakan yang telah diterapkan Pemerintah Pusat mengenai pengembangan desa dan anggarannya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian tentunya diperlukan SDM yang memiliki kualitas dan komitmen yang tinggi untuk dapat memanfaatkan dana yang diberikan kepada pemerintah desa agar efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam implementasi pengelolaan dana desa dilihat dari kesiapan SDM dan komitmen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Responden penelitian ini adalah aparatur desa dan pengurus BUMDES sebanyak 20 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Instrumen yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis langsung di lapangan.

**Keywords:** Kesiapan SDM, Komitmen, Kesiapan Pengelolaan Dana.

---

## **1. Pendahuluan**

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang di dalamnya mengatur mengenai urusan dan wewenang pemerintahan desa. Desa merupakan salah satu unsur penting yang dapat digunakan sebagai pendorong untuk memajukan perekonomian nasional. Desa diberikan anggaran yang dapat digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat, dana tersebut adalah dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dapat digunakan untuk pembangunan desa, bantuan kepada masyarakat, dan pembangunan usaha desa yang disebut BUMDes. Melihat cukup pentingnya peran dana desa maka harus ada SDM yang mengelola dan menyalurkan dana desa supaya tujuan adanya dana tersebut dapat tercapai dan penggunaannya bisa efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas)".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam implementasi pengelolaan dana desa dilihat dari kesiapan SDM dan komitmen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Responden penelitian ini adalah aparatur desa, pengurus BUMDes, RT, RW, dan Pokdarwis sebanyak 20 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Instrumen yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis langsung di lapangan.

## 2. Tinjauan Literatur

### 2.1 Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (UU No.6 Tahun 2014). Dari segi politis UU ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang disebut dengan otonomi desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak untuk keberhasilan semua program. Karenanya upaya memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2005:76).

### 2.2 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa).

*Table 1 Dana Desa yang Diterima Desa Lingasari Tahun 2018-2022*

Tahun	Dana Desa (Rp)
2018	1.209.086.125
2019	1.298.471.125
2020	1.448.076.525
2021	1.477.709.605
2022	1.498.320.000

*Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Desa Lingasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas (2022)*

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat Anggaran Dana Desa yang diperoleh oleh pemerintah Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas pada tahun 2018-2022. Dari tahun 2018 dapat dilihat bahwa penerimaan Anggaran Dana Desa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 Desa Linggasari memperoleh Dana Desa sebesar Rp1.209.086.125, tahun 2019 mendapatkan kenaikan menjadi Rp1.297.471.125, pada tahun 2020 memperoleh kenaikan menjadi Rp. 1.448.076.525, tahun 2021 memperoleh kenaikan menjadi Rp1.477.709.605, tahun 2022 memperoleh kenaikan menjadi Rp1.498.320.000. Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2019-2020 yaitu mengalami peningkatan sebesar 11,52% dan rata-rata dana desa yang diperoleh Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas mulai dari tahun 2018-2022 sebesar Rp1.386.332.676,00. Pada aturan dana desa, anggaran yang diberikan digunakan untuk beberapa kegiatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan desa untuk mendukung perekonomian nasional. Pentingnya pengelolaan dana desa agar dana yang ada dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. (A Irawan dalam Suwardana, 2015: 94). Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. (A. Irawan dalam Suwardana, 2015: 94). Penggunaan dana desa pada dasarnya difokuskan pada untuk pembangunan desa dari berbagai bidang dan untuk kepentingan masyarakat. Desa Linggasari menggunakan dana desa untuk pembangunan desa, penanganan Covid-19, BLT-Dd, dan BUMDes.

### 2.3 Kesiapan

Sebuah organisasi, penerapan kebijakan dan juga menjalankan tatanan yang menyangkut hidup masyarakat perlu dilakukan persiapan yang cukup matang agar tercapai tujuan bersama. Tidak terkecuali dalam penerapan dan pemanfaatan anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Kesiapan itu bisa dilihat dari berbagai hal baik aturan, konsep, SDM, regulasi, dan sebagainya. Secara garis besar persiapan merupakan penandaan konitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan dan siap untuk berubah adalah ketika orang-orang dan struktur organisasi sudah dipersiapkan serta mampu untuk berubah (Armenakis, dkk dalam Arif, 2015). Berdasarkan pendapat diatas dapat disangkutpautkan dengan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas perlu dipersiapkan secara matang agar tujuan dari adanya dana desa yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat kepada desa untuk dapat membantu pertumbuhan baik perekonomian, sosial, politik, dan budaya.

### 2.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh sekelompok tim ataupun sebuah organisasi kerja, begitu pula untuk berbagai macam bentuk badan usaha yang memproduksi barang ataupun jasa agar dapat menjalankan fungsinya sebenar-benarnya. Banyak defenisi yang dapat digunakan untuk mendefenisikan SDM. SDM atau *human resources* mengandung

dua pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat (Sumarsono, 2003:4). Pengelolaan dana desa yang baik, aparatur pemerintahan desa yang terkait harus memiliki kompetensi, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai, mendapatkan pelatihan, dan memiliki pengalaman dalam bidangnya. Sebuah organisasi harus dipastikan bahwa pengelolaan SDM dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. SDM merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting sebagai pilar penyangga utama sekaligus sebagai penggerak dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan utama dari organisasi (Sukmaningrum, 2011).

### *2.5 Komitmen Organisasi*

Komitmen organisasi secara umum merupakan keadaan dimana seseorang sangat tertarik dan mengidentifikasi dirinya dalam sebuah organisasi sesuai dengan tujuan, nilai-nilai serta sasaran organisasi tersebut yang membuat seseorang tetap ingin tinggal dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi adalah sebagai kendala dimana karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Indisari, 2008). Komitmen organisasi mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang terhadap organisasi berupa loyalitas, usaha untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi. Adanya komitmen aparatur desa yang tinggi maka pencapaian tujuan organisasi akan lebih mudah diwujudkan.

## **3. Metodologi Penelitian**

### *3.1 Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggambarkan kondisi yang apa adanya tanpa perlu adanya manipulasi pada variabel yang diteliti dan lebih menekankan makna. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, dan pengamatan mendalam di lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya.

### *3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian*

Waktu penelitian dilakukan pada awal bulan Maret tahun 2022, namun untuk pengambilan data dengan cara wawancara terhadap perangkat desa, pejabat BUMDes, beberapa masyarakat dan juga menggunakan data yang sudah ada seperti pelaporan realisasi, data pengelolaan dana desa dan pengaruhnya sejak tahun 2019-2021. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus pada intisari penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian ini harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu (Moeloeng, 2006: 92). Berdasarkan hal tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengelolaan dana desa, SDM, dan komitmen dari perangkat desa dan pejabat BUMDes. Hal tersebut untuk mengetahui pengaruh kesiapan dari SDM dan komitmen terhadap kesiapan penerapan dana desayang dapat menunjang kemajuan Desa Linggasari Kecamatan Kembaran apabila dapat diterapkan dengan efektif dan efisien.

### 3.4 Metode Penelitian

Menurut Kriyantono (2008: 160) mengatakan bahwa metode penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data yang biasanya dilakukan oleh periset. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (library research) yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung keobjek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data akan dilakukan dengan cara melakukan analisis hasil wawancara dengan narasumber mengenai masalah penelitian. Analisis akan dituangkan secara deskriptif melalui telaah literatur dan hasil wawancara terkait masalah penelitian. Hasil analisis disimpulkan dan diberikan saran perbaikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan Pemerintah Desa Linggasari dalam mengelola dana desa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode obeservasi (pengamatan secara langsung), wawancara (tanya jawab), dokumentasi, dan studi pustaka.

### 3.6 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggambarkan kondisi yang apa adanya tanpa perlu adanya manipulasi pada variabel yang diteliti, dan lebih menekankan makna. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi dan pengamatan mendalam dilapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Pengumpulan data dilakukan pada 20 responden yang meliputi perangkat desa, ketua BPD, ketua BUMDes, kelompok tani dan perwakilan warga desa. Keseluruhan responden diwawancari sesuai dengan indikator dan data yang ingin diperoleh untuk mendukung penelitian yang dilakukan, wawancara tersebut meliputi kesiapan pemerintahdesa dalam mengelola dana desa dari segi SDM dan komitmen.

##### 4.1 Kondisi Kemamouan Aparatur Desa, Pengurus BUMDes, dan Pengelolaan Dana Desa Dari Segi Sumber Daya Manusia

###### 4.1.1 Pengelola Dana Desa

Pengelola dana desa di Linggasari mencakup banyak sektor, seperti aparatur desa, pengurus BUMDes, pengurus gabungan tani, RT, dan RW. Semua elemen tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing masing. Mereka bekerja sama dalam mengelola dana desa untuk tercapainya pembangunan desa baik dari segi perekonomian, segi kesehatan dan sosial masyarakat.

“.... Pengelola dana desa disini dapat dilihat dari struktur pemerintah desa, semua komponen saling bekerjasama untuk menyalurkan dana desa supaya anggaran tersebut bisa efektif dan efisien, selain itu dalam penyusun program kerja baik yang terkait dengan dana desa ataupun dana lain yang mengalir ke desa, juga dilaksanakan rapat dengan BPD yang anggotanya diambil dari perwakilan masyarakat, ikut juga ada RT dan RW. Hasil dari rapat tersebut disampaikan kepada masyarakat” (wawancara dengan Sekretaris Desa Linggasari pada hari kamis, 5 Mei 2022 pukul 08.00).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa diketahui elemen pengelola dana desa di Linggasari bukan hanya dari aparatur desa saja namun semua pihak terlibat dalam pengelolaan dana desa, seperti pengurus BUMDes, Jajaran BPD, RT, RW, dan pengurus gabungan tani. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Kaur Perencanaan. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan pada Balai Desa Linggasari memang seluruh elemen terlibat dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut diketahui dengan beberapa ketua RT sedang memberikan datamengenai anggaran pembangunan jalan, selain itu ada beberapa aparat yang sedang melakukan diskusi untuk pembangunan balai desa.

###### 4.1.2 Keterampilan dan Keahlian

Keterampilan dan keahlian seseorang akan mendukung setiap tugas dan tentunya dapat memudahkan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Di Desa Linggasari pengelola dana desa cukup memiliki keterampilan dalam pengelolaan dana desa namun berdasarkan beberapa pengakuan dari aparatur desa, ketua BUMDes dan Gapoktani masih perlu adanya peningkatan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada.

“ Untuk keterampilan pengelola dana desa sebenarnya masih ditarap cukup,

tidak terlalu rendah tapi juga bukan yang tinggi dan tentunya masih perlu adanya pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM baik itu aparatur desa, pengurus BUMDes, Gapoktani dan juga



pengelola yang lain. Pelatihan tersebut dapat berupa pelatihan komputer, pelatihan manajemen SDM yang baik, strategi pemasaran dan cara berani yang baik dan efisien” (wawancara Sekretaris Desa Linggasari hari Kamis, 5 Mei 2022 pukul 08.10).

Hasil Wawancara menjelaskan bahwa keterampilan dan keahlian SDM yang mengelola dana desa di Linggasari sudah cukup baik namun masih perlu adanya pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dari SDM yang nantinya berguna bagi Desa Linggasari, pelatihan tersebut dapat berupa pelatihan komputer untuk aparat, pelatihan manajemen SDM dan pemasaran untuk BUMDes dan Pelatihan cara bertani yang baik dan efisien serta nantinya bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Selain itu juga dilihat dari pengamatan terhadap SDM yang ada di Desa Linggasari baik dari aparat desa, pengurus BUMDes, dan kelompok tani sudah memiliki keterampilan dan keahlian namun masih hanya orang-orang itu saja belum mencakup banyak orang dan memang perlu dilaksanakan pelatihan, seminar, dan webinar untuk menambah keterampilan dan keahlian yang dapat meningkatkan kualitas dari SDM dalam implementasi pengelolaan dana desa.

#### 4.1.3 *Pengetahuan*

“... Untuk pengetahuan mengenai dana desa sendiri terutama aparat desa sudah paham, selain itu elemen lain yang terkait juga sudah memahaminya karena di awal perencanaan anggaran program terkait juga sudah dirapatkan oleh BPD dan disampaikan masyarakat, selain itu dari aparat juga terbuka apabila ada masyarakat desa ingin mengetahui aliran dana desa dan kami pun menempel laporan dari realisasi kegiatan pada papan pengumuman. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa memang semua pengelola sudah cukup paham dan memiliki pengetahuan tentang dana desa, namun juga terkadang namanya juga manusia masih ada kesalahpahaman dalam penerimaan informasi dari mulut ke mulut yang tersampaikan kepada masyarakat” (Wawancara Sekretaris Desa pada hari Rabu, 1 Juni 2022 pukul 10.00).

Hasil wawancara menjelaskan hampir seluruh elemen yang ada dalam pengelolaan dana desa sudah memiliki pengetahuan tentang dana desa itu sendiri, dapat digunakan untuk apa saja dana desa itu, anggaran yang dapat menggunakan dana desa. Terdapat juga rapat awal yang dilaksanakan untuk penyusunan program dan nantinya disampaikan secara transparan kepada masyarakat mengenai anggaran dan realisasinya, masyarakat dapat melihat secara langsung di Balai Desa.

#### 4.1.4 *Sikap Kerja*

“... Untuk Pengelola dana desa sudah menerapkan sikap kerja yang bagus, mereka menunjukkan rasa semangat yang cukup tinggi, dedikasi yang bagus pula demi kepentingan masyarakat dan saya lihat juga tidak ada yang memberikan keluhan kepada perangkat desa baik dalam pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur maupun pembagian BLT, mungkin ada beberapa yang masih protes mengenai BLT namun setelah dijelaskan dan dijabarkan dengan jelas masyarakat pun memahami pada akhirnya.” (Wawancara Warga Desa Linggasari).



Pernyataan masyarakat tersebut mengenai sikap kerja perangkat Desa Linggasari, perangkat desa memiliki semangat yang tinggi dan sikap kerja yang bagus. Berbeda dengan perangkat desa, pengurus BUMDes masih perlu adanya peningkatan dalam sikap kerja karena masih banyak pengurus yang tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya. Sikap kerja pengurus BUMDes Linggasari masih perlu adanya peningkatan dan motivasi karena berdasarkan wawancara disampaikan bahwa masih banyak pengurus yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai mana yang sudah ditetapkan, hanya beberapa pengurus saja yang menerapkan sikap kerja yang baik. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan sikap kerja dari perangkat desa memang sudah baik, mereka juga memiliki SOP dalam pelayanan yang ada di balai desa dan semua orang bisa membacanya, apabila perangkat tidak melaksanakan SOP tersebut masyarakat juga berhak melaporkannya, untuk pengurus BUMDes memang masih terlihat kurang dalam melaksanakan sikap kerja hal tersebut terlihat hanya ketua saja yang bergerak dalam setiap kegiatan.

#### 4.1.5 *Kerja Sama*

“... Dalam pengelolaan dana desa kami melakukan kerjasama satu sama lain, semua bidang saling membantu misalnya sesama perangkat akan membantu meskipun itu bukan dari bidangnya namun atas seizin yang berwenang. Selain itu elemen lain seperti RT, RW dan BPD dan beberapa unsur lain juga membantu seperti publikasi informasi yang dilakukan oleh BPD, Ketua RT dan RW kepada masyarakat tentang BLT.” (Wawancara Kasi Pemerintahan pada hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 10.35).

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kerjasama yang cukup baik dari semua pengelola baik dari aparatur desa, BPD, RT, dan RW. Perangkat desa bekerjasama dalam mengatur segala urusan pemerintahan desa demi tercapainya tujuan bersama. Berdasarkan hasil pengamatan di balai desa perangkat desa juga saling tolong menolong dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perangkat desa juga bekerjasama satu sama lain.

#### 4.1.6 *Kuantitas*

“... Jumlah perangkat desa yang ada disini adalah 16 orang dengan pembagian sebagaimana yang ada di struktur pemerintah desa, masing masing terdiri dari Kades, Sekdes, kasi pemerintahan, 3 Kadus, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur perencanaan, staf kasi pemerintahan, staf kasi kesejahteraan, staf kasi pelayanan, staf kaur tata usaha dan umum, dan staf kaur perencanaan. Sebenarnya dalam aturan terbaru jumlah perangkat desa itu hanya 11 namun karena desa Linggasari melakukan pembukaan perangkat desa sebelum tahun 2018 dengan jumlah 16 dan dalam aturan untuk jumlah perangkat desa yang lebih dari 11 orang namun melakukan *open recruitment* sebelum tahun 2018 maka boleh untuk tetap dengan jumlah tersebut tanpa dikurangi. Dengan adanya hal itu dikemudian hari jika ada perangkat desa yang harus pensiun maka Desa Linggasari tidak perlu melakukan pembukaan untuk perangkat

desa, yang pensiun akan digantikan oleh yang menjadi staf”. (Wawancara Sekretaris Desa pada hari Selasa, 31 Mei 2022).

Melalui hasil wawancara diketahui bahwa kuantitas perangkat Desa Linggasari sudah sesuai dengan kuota yang diatur oleh peraturan perundangan undangan yang berlaku, dengan kelebihan SDM yang ada dibandingkan dengan desa lain, dan kuota terbaru membuat perangkat desa Linggasari yang akan pensiun sudah ada calon penggantinya dari staf dan tidak memerlukan *open recruitment* lagi. Hal tersebut juga didukung dari hasil observasi lapangan bahwa dalam struktur pegawai pemerintahan Desa Linggasari sudah sesuai dengan aturan yang ada, jumlah perangkat desa yang cukup banyak juga dirasa cukup efisien dan membantu dengan total luas wilayah Desa Linggasari yang tidak sedikit, selain itu perangkat Desa Linggasari dalam memberikan pelayanan juga sudah cukup bagus, tidak ada pegawai yang terlihat duduk-duduk tanpa ada kegiatan selain jam istirahat dan tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan apabila ada urusan yang berkaitan dengan desa.

#### 4.1.7 *Kualitas*

“... SDM yang ada dalam pengelola dana desa terutama perangkat desa yang menjadi elemen terdekat dalam pengelolaan dana desa ini sebenarnya sudah baik, mereka memiliki kualitas dan kemauan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan, namun tetap saja perlu adanya pelatihan secara berkala supaya keahlian dan pengetahuan mereka terus menerus meningkat, karena kebanyakan perangkat desa sudah tidak muda lagi sehingga apabila ada pelatihan namun dilakukan hanya sekali saja mereka akan lupa, setidaknya perlu pelatihan yang berkala terutama tentang teknologi yang dapat memudahkan kerja perangkat desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa”. (Wawancara Kasi Pelayanan pada hari Kamis, 2 Juni 2022 Pukul 11.05).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa SDM dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik dan berkualitas, terutama dari perangkat desa karena dari segi pengetahuan dan keahlian dalam menjalankan tugas dan urusan pemerintahan sudah berjalan dengan lancar, meskipun demikian perlu adanya pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada secara berkala, karena faktor usia pada diri perangkat desa tidak dapat dibohongi, daya ingat mulai menurun jika dilakukan pelatihan hanya sekali maka peluang untuk perangkat desa mengingat dan mempraktekan ilmu yang diberikan cukup rendah. Namun pengelola dana desa bukan hanya perangkat desa saja tetapi ada juga pengurus BUMDes, kelompok tani, dan lainnya. Hal tersebut juga didukung oleh hasil observasi lapangan bahwa pada dasarnya perangkat desa sudah memiliki kualitas yang memadai untuk menjalankan urusan pemerintahan desa baik mengelola dana desa, realisasi program kerja maupun pelayanan terhadap masyarakat hanya saja perlu adanya pelatihan berkala yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian perangkat desa yang akan menunjang peningkatan kualitas SDM. Faktor usia juga dapat terlihat, perangkat desa yang ada memang terlihat sudah tidak muda lagi. Untuk pengurus

BUMDes memang masih belum terlihat secara jelas akan keberhasilan program bkerjanya dan dirasa juga masih perlu peningkatan, pelatihan, dan webinar yang bertujuan untuk mendorong kualitas yang lebih bagus lagi bagi SDM pengelola dana desa.

#### 4.1.8 *Ketepatan Waktu*

“...Pengelola dana desa seperti perangkat desa, pengurus BUMDes, kelompok tani dan Satgas Covid sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan rencana awal program kerja Desa Linggasari, hanya beberapa program kerja saja yang harus dialihkan karena harus beradaptasi dengan keadaan pandemi, program kerja tersebut seperti pembangunan balai desa yang harus terhenti dan dialihkan dananya untuk BLT dan penanganan Covid, memang masih ada yang belum berjalan dengan baik seperti program pertanian dan BUMDes yang masih perlu pengawasan, perlu SDM yang memadai dan modal yang cukup”. (Wawancara Ketua BPD Desa Linggasari pada hari Sabtu, 2 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perangkat Desa Linggasari telah melaksanakan hampir semua program kerja sesuai dengan ketepatan waktu di awal rencana program, hanya ada beberapa program saja yang tidak dapat berjalan dan harus dialihkan ke program yang lebih darurat sesuai dengan adaptasi terhadap keadaan yang ada saat ini. Pernyataan tersebut didukung juga dengan pengamat di lapangan banyak program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketepatan waktu, misalnya saja pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan yang terbaru adalah pembangunan balai desa yang sedang berjalan dan sesuai dengan rancangan awal program kerja desa Linggasari.

#### 4.2 *Komitmen*

##### 4.2.1 *Komitmen Afektif*

“... Untuk perangkat desa sendiri sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidangnya masing-masing dan saling membantubidang lain, dengan adanya hal tersebut kami merasa senang dan nyaman bekerja disini. Saya juga melihat dan berdasarkan cerita dari perangkat desa lain mereka merasa nyaman dan ingin terus bekerja dan mengembangkan karir disini. Dalam diri kami perangkat desa selalu menanam kan bahwa rencana program yang sudah dirancang dan disetujui bersama harus terlaksana dan sukses, hal tersebut juga selalu disampaikan oleh atasan atasankami seperti pak Sekdes dan Bu Lurah”. (Wawancara Staf Kasi Kesejahteraan pada hari Rabu, 8 Juni 2022 pukul 09.00).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa perangkat Desa Linggasari memiliki rasa nyaman dan keinginan untuk mengembangkan karir di pemerintahan desa, selain itu mereka memiliki semangat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidangnya namun tetap saling tolong menolong dalam menjalankan tugasnya. Rasa semangat itu juga timbul saat menjalankan program kerja dan berusaha agar program kerja yang sudah dirancang diawal tahun dapat terlaksana dengan sukses. Selain itu didukung juga berdasarkan hasil studi pustaka dan pengamatan lapangan bahwa setiap tahun program kerja mengalami peningkatan, tidak banyak program kerja yang tidak dapat

direalisasikan dan dilihat dari pengamatan di balai desa bahwa perangkat desa memiliki rasa semangat dan selalu terlihat gembira dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melayani masyarakat dan urusan pemerintahan desa, namun untuk pengurus BUMDes masih belum ada komitmen terhadap organisasi dan perlu adanya peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dengan beberapa program yang sudah dirancang masih belum bisa berjalan, usaha desa juga hanya beberapa saja yang mengurus belum keseluruhan dari Pengurus BUMDes.

#### 4.2.2 *Komitmen Berkelanjutan*

“...Tidak dapat dipungkiri bahwa karena rasa nyaman dalam bekerja, alasan untuk mencari rezeki dan susahny mencari pekerjaan juga mencari salah satu faktor kami tetap bekerja disini, meskipun bukan faktor utama tetapi tetap ada. Sebenarnya karena rasa nyaman di lingkungan kerja sekarang, saling tolong menolong antar bidang kaya saling back up gitu, dan karena memang sudah kenal dengan teman teman perangkat yang lain”. (Wawancara kasi pemerintahan pada hari Selasa, 31 Mei 2022).

Dari hasil wawancara bahwa unsur alasan sosial dan ekonomi merupakan salah satu faktor mereka tetap menjaga komitmen untuk menjadi perangkat Desa Linggasari memang benar, meskipun bukan menjadi faktor utama. Faktor utamanya karena sudah merasa nyaman bekerja menjadi perangkat Desa Linggasari.

#### 4.2.3 *Komitmen Normative*

“... Perangkat desa kami memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya untuk selalu membantu masyarakat desa Linggasari dan saya tekankan juga kepada perangkat desa untuk selalu memberikan hal yangterbaik untuk desa ini.” (Wawancara Bu Lurah).

Berdasarkan wawancara tersebut perangkat desa sudah menerapkan komitmen normatif dengan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan dan mengatur urusan pemerintahan, selain itu dari atasan juga memerintahkan untuk memberikan hal yang terbaik demi kemajuan desa.

## 5. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian “Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas), yang dikaji berdasarkan hasil temuan di lapangan dan pembahasan terhadap fokus penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

### 5.1 *Sumber Daya Manusia*

SDM yang mengelola dana desa pada dasarnya sudah memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, kerjasama, kuantitas, ketepatan waktu yang cukup memadai dan dapat dikatakan siap. Berdasarkan pengamatan juga dapat dilihat bahwa pengelola dana desa di Linggasari cukup mampu, dan telah menerapkan aturan aturan yang ada dengan baik, sika kerja yang baik juga ditunjukkan oleh

perangkat Desa Linggasari dalam mengelola dana desa namun dari segi kualitas masih perlu adanya peningkatan untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Meskipun begitu seluruh pengelola sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan cukup baik terbukti dengan pengelolaan dana desa selama ini berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa kendala namun dapat beradaptasi dan teratasi. Dari pengurus BUMDes masih kurang memadai baik dari kuantitas dan kualitas, hal ini menyebabkan beberapa usaha milik Desa Linggasari masih marak dan belum berjalan sesuai dengan rencana awal. Dari kelompok tani juga seperti itu masih diperlukan adanya pelatihan dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas SDM yang mengelola pertanian di Desa Linggasari, beberapa rencana pertanian Desa Linggasari harus gagal karena masih kurang SDM.

### 5.2 *Komitmen*

Dari segi komitmen dari aparatur Desa Linggasari sudah bagus, hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara yang ada bahwa banyak yang ingin tetap bekerja di Desa Linggasari, selain itu berdasarkan pengamatan aparatur desa juga tidak ada yang bekerja dalam kurun waktu singkat, kebanyakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Aparatur desa juga banyak yang berkeinginan untuk mengembangkankarir sebagai perangkat desa di Linggasari. Pengurus BUMDes masih sangat minim untuk segi komitmen karena banyak pengurus yang belum menjalankan tugas dan fungsinya, banyak program yang masih belum berjalan karena kendala SDM yang tidak berkomitmen, yang bergerak hanya orang-orang itu saja, hal tersebut dikarenakan pencairan dana yang cukup lama dan tidak adanya gaji tetap sehingga pengurus BUMDes harus mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Kelompok tani dan pengelola lain sama dengan BUMDes masih kurang adanya komitmen dalam menjalankan program yang telah dirancang, beberapa program harus terhenti, sudah ada modal namun masih belum bisa berjalan karena SDM yang kurang dari segi kuantitas.

## 6. **Saran**

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan, maka saran dari peneliti sebagai berikut:

- 6.1 Perlu adanya pelatihan untuk semua elemen pengelola dana desa baik dari perangkat desa, pengurus BUMDes, Kelompok Tani, RT, dan RW. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan dana desa yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dari dana desa guna mendukung pembangunan desa dari segala sektor.
- 6.2 Perlu adanya peminjaman modal usaha dan dana khusus untuk BUMDes, dan adanya peremajaan pada pengurus BUMDes dengan melibatkan remaja atau karang taruna yang masih memiliki semangat yang tinggi untuk memajukan desa tanpa adanya gaji tetap di awal.
- 6.3 Perlu dilaksanakan Recruitment yang jelas terhadap pengurus BUMDes dengan memperhatikan kompetensi dari calon pengurus.

6.4 Perlu adanya monitoring baik dari lembaga pengawas untuk usaha desa seperti BUMDes atau usaha tani dalam pengelolaan anggaran supaya tujuan dari penggunaan dana desa dapat tercapai dengan maksimal.

## **7. Keterbatasan Penelitian**

7.1 Keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian sehingga dalam mengumpulkan data belum terlalu mendalam.

7.2 Terdapat perasaan takut dari responden saat dilakukan wawancara sehingga pada awal penelitian masih belum mendapatkan data yang jelas, namun seiring berjalannya waktu peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam.

7.3 Terdapat kesibukan dari narasumber seperti ketua RT, RW, BUMDes, BPD dan kelompok tani.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia Yulianti, Rizky. 2011. *Regulatory Gap Analysis*.
- Ardiami, Kinanthi Putri & Hadri Kusuma. 2018. *Analisis Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Sesuai dengan Undang-Undang*. Future Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol. 6(1): 28-46; September 2018.
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Dessler, Gary. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT INDEKS.
- Ferina, Ika Sasti, dkk. 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 14 No.3.
- Fitri. 2015. *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi*. Jurnal Katalogis. Volume 3; 180-193).
- Kusuma, Ririz Setiawati. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Skripsi Universitas Jember, Jember.
- Laia, Gairah. 2019. *Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan*. Teluk Dalam. STIE Nias Selatan.
- Luthans. 2006. *Perilaku Organisasi edisi 10*. Yogyakarta: Penerbit Andy
- Mada, Sarifudin dkk. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo*. Jurnal. Program Megister Akuntansi.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2012. *Evaluasi Kinerja SDM*. Cetakan Keenam. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, J Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Niko
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat*: Jakarta.
- Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan

Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Penuh Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010*. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Ramadhan, Wahyu & Fefri Indra Arza. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Aparatur Desa dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. 3(3). 672-686.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.



- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Robbins & Judge. 2014. *Perilaku Organisasi*.
- Robibins & Judge. 2011. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robibins & Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanapi, Firman Gana. 2015. *Gambaran Umum Paket Regulasi Keuangan Desa*.
- Siahaan, Pesta. B. R. 2016. *Analisis Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Dana Desa*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sopiah. 2010. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Streess dala Desler. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2022. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno. 2015. *Menyoal Kesiapan Pemerintah Desa*. Jakarta: Media Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usman, Fadlil & Sulisty Dwi Haryanto. 2015. *Analisis Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)*.